



BULETIN

PARLEMENTARIA

NOMOR: 753/I/2013

I/JANUARI 2013



DPR PERLU BEKERJA KERAS UNTUK MENCAPAI TARGET

Jangan lewatkan info DPR terkini dan live streaming TV Parlemen di www.dpr.go.id

KEGIATAN DPR-RI MINGGU PERTAMA JANUARI 2013

Oleh: Ketua DPR-RI, DR.H. Marzuki Alie

Kegiatan DPR-RI minggu pertama bulan Januari 2013, ditandai dengan pembukaan Masa Persidangan III 2012-2013, yang dimulai 7 Januari 2013. Ketua DPR mengucapkan selamat tahun baru 2013 pada awal pidato pembukaan sidang, dan menyampaikan refleksi peristiwa nasional, antara lain mengenai berbagai peristiwa sosial-politik, perkembangan ekonomi, penegakan hukum, pelaksanaan HAM dan berbagai bidang lainnya. Tahun 2013, politik nasional diperkirakan akan semakin dinamis, seiring dengan makin dekatnya Pemilu tahun 2014. Berikut adalah beberapa poin pidato pembukaan sidang tersebut.

Kegiatan Bidang Legis- lasi

Untuk tahun 2013, DPR dan Pemerintah telah menetapkan 70 RUU sebagai RUU Prioritas. Yaitu terdiri dari 32 RUU yang telah memasuki pembicaraan tingkat I, 2 RUU yang sedang dilakukan harmonisasi, dan 36 RUU yang merupakan RUU baru, baik yang diusulkan oleh DPR maupun Pemerintah. Pimpinan Dewan mengharapkan agar RUU-RUU yang sudah memasuki pembicaraan tingkat I, harus tuntas diselesaikan pada masa sidang ini. Alokasi waktu yang cukup panjang pada masa persidangan ini, diharapkan dapat lebih diprioritaskan untuk penyelesaian sejumlah RUU, mengingat produktifitas Dewan dalam pelaksanaan fungsi ini dinilai masih rendah.

Salah satu RUU yang menjadi perhatian publik adalah RUU tentang Organisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) yang saat ini dalam tahap pembicaraan tingkat I di Pansus. RUU ini masih menyisakan beberapa substansi yang belum menemukan kata sepakat, diantaranya mengenai definisi, asas, klasifikasi Ormas Asing,



larangan, sanksi administratif, pembekuan dan pembubaran ormas, serta ketentuan pidana bagi anggota dan pengurus Ormas.

Selain itu, RUU tentang Desa yang bulan Desember lalu diprotes masyarakat, saat ini sedang dibahas oleh DPR dan Pemerintah. Dewan tetap memperhatikan aspirasi dari perangkat desa. Masyarakat perlu tahu bahwa RUU ini adalah bagian dari penyempurnaan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dewan dan Pemerintah telah sepakat untuk memecah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ini menjadi tiga RUU, yaitu RUU tentang Pemerintahan Daerah, RUU tentang Desa, dan RUU tentang Pemilihan Kepala Daerah. Ketiga RUU ini akan dibahas secara simultan karena materinya saling berkaitan. Dengan demikian, RUU Desa ber-

sama dengan dua RUU tersebut, akan diupayakan selesai pada akhir Masa Sidang III.

DPR akan menampung setiap aspirasi masyarakat, namun masyarakat desa juga harus paham mengenai keterbatasan keuangan negara. Pada intinya tujuan yang akan kita ca-



pai adalah sama, yaitu upaya mewujudkan kemajuan serta kesejahteraan bagi perkembangan desa dan masyarakat desa.

Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, tahun 2013 ini, banyak hal yang harus dilakukan oleh DPR melalui alat-alat kelengkapannya. Antara lain melakukan tindak lanjut ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK-RI tahun 2012, dan kegiatan pengawasan oleh tim pengawas diantaranya Tim Pengawas Pengusutan Kasus Bank Century yang telah diperpanjang masa tugasnya. Tim Pengawas terhadap Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria yang sudah terbentuk agar segera melaksanakan tugas dan kegiatannya. Sementara itu, dalam rangka melakukan pengawasan terhadap TKI di luar negeri yang tidak luput dari berbagai permasalahan, Dewan juga akan membentuk Tim Pengawas TKI di Luar Negeri.

Terhadap Tim Pemantau Pelaksanaan UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 yang telah diubah dengan UU No. 35 tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, juga telah dilakukan perpanjangan masa tugas. Pemberian otonomi khusus merupakan kebijakan politik yang tepat untuk membangun kepercayaan bagi masyarakat di kedua daerah tersebut. Untuk itu, Dewan meminta agar dalam pelaksanaannya pemerintah terus melakukan langkah-langkah kongkret yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan rakyat Aceh maupun Papua.

Penetapan Pejabat Publik

Pada Masa Persidangan III, ada beberapa pejabat publik yang perlu segera diproses penetapannya oleh Dewan, yaitu pencalonan Hakim Agung, Deputi Gubernur BI, dan Hakim Konstitusi. Penetapan calon Hakim Agung adalah untuk mengisi kekosongan 5 Hakim Agung periode pertama, dan 4 Hakim Agung periode kedua, Komisi Yudisial telah mengajukan nama-nama calonnya, sesuai peraturan perundangan, yang akan segera ditangani oleh Komisi III melalui fit and proper test. Berkenaan dengan pencalonan Hakim Konstitusi, Badan Musyawarah DPR-RI telah menugaskan Komisi III DPR untuk segera membahasnya karena akan habis masa jabatannya pada 1 April 2013. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terhadap penetapan Hakim Konstitusi ini, DPR akan melaksanakannya secara obyektif, transparan, dan partisipatif.

Pelaksanaan Fungsi Anggaran

Dalam pelaksanaan fungsi anggaran, DPR akan menerapkan sistem *check and balances*, terutama pada saat membahas mengenai pelaksanaan pertanggungjawaban APBN yang sedang berjalan. Pelaksanaan fungsi ini merupakan wewenang konstitusional DPR yang diamanatkan dan diatur dalam UUD NRI tahun 1945, UU No. 17 tahun 2003 ten-

tang Keuangan Negara, UU No 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta peraturan Tata Tertib DPR-RI.

Pimpinan Dewan meminta agar Badan Akuntabilitas Keuangan Negara DPR-RI melanjutkan evaluasi atas hasil pemeriksaan BPK tentang pengelolaan keuangan negara, dan memonitor tindak-lanjut yang dilakukan oleh Komisi-Komisi DPR.

Permasalahan Ekonomi

Dalam masalah ekonomi, DPR mengharapkan bahwa sepanjang tahun 2013, situasi perekonomian Indonesia makin membaik dan berkualitas, bukan pertumbuhan yang bergantung pada tingkat konsumsi masyarakat dan berpotensi mengalami *middle income trap*. Dewan meminta kepada Pemerintah untuk membenahi sarana infrastruktur, guna memacu pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% pada tahun 2013. Anggaran pembangunan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 201,3 triliun.

Terkait dengan masalah infrastruktur, DPR menyoroti kejadian gangguan listrik pada *Air Traffic Control (ATC)* di Bandara Soekarno Hatta, padamnya listrik di Bandara Sepinggan Balikpapan, begitu pula dengan infrastruktur di pelabuhan, jalan raya dan jalan tol. Kemacetan di ibukota Jakarta yang semakin hari semakin parah, juga hendaknya menjadi perhatian serius meskipun saat ini fenomena kemacetan juga sudah melanda beberapa kota besar lain di Indonesia. Dewan meminta Pemerintah, untuk melakukan terobosan yang *out of the box* untuk menangani masalah kemacetan. Setiap perencanaan desain tata kota hendaknya dilakukan dengan pemikiran kepentingan jangka panjang.

Dalam rangka menopang pertumbuhan perekonomian pada tahun 2013, kepastian hukum dalam berinvestasi juga merupakan kunci penting yang harus diperhatikan. Indonesia memiliki target investasi sebesar Rp. 390 triliun di tahun 2013. Tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik, akan menjadi daya tarik investor dari negara-negara Asia seperti Jepang dan Korea. Dewan mendukung pembenahan pelayanan perizinan berinvestasi, sehingga masalah yang berkaitan dengan proses perizinan yang sering dikeluhkan oleh investor dapat diatasi, agar target investasi tahun 2013 tercapai.

Meningkatnya kebutuhan premium nasional di saat kemampuan produksi premium dalam negeri stagnan, upaya mengatasi masalah dengan impor premium, sangat merisaukan, karena akan menimbulkan ketergantungan pada luar negeri. Kita ketahui, 70% kebutuhan premium nasional harus didatangkan dari negara lain, sementara hanya 30% yang diproduksi di dalam negeri. Nilai rata-rata impor premium sudah mencapai 11,6 juta barel atau 1,84 juta kiloliter per-bulan. Membengkaknya impor premium ini terjadi, karena belum maksimalnya produksi kilang minyak untuk memenuhi peningkatan kebutuhan premium dalam negeri. Lambatnya realisasi pembangunan kilang di Sumatera Selatan, di Balongan dan di Tuban, adalah karena besarnya investasi dan rendahnya margin yang akan diterima. Dewan



mengharapkan, pembangunan ketiga kilang minyak yang direncanakan paling akhir selesai pada tahun 2019, tidak meleset. Karena penyelesaian kilang yang memiliki total kapasitas mengolah minyak 900.000 barrel per-hari, diperkirakan akan mampu mengurangi volume impor premium. Dewan juga meminta Pemerintah untuk segera menindaklanjuti kebijakan program energi terbarukan, karena program tersebut telah menjadi kebutuhan kita.

Selain masalah pertumbuhan ekonomi, infrastruktur dan BBM, DPR juga menyoroti masalah pemboikotan yang dilakukan APINDO dengan cara menarik seluruh keanggotaan seluruh perwakilan mereka dari LKS Tripartit Nasional. Dewan menyangkan hal ini dan meminta Pemerintah untuk kembali mengajak APINDO dan organisasi pekerja, dalam rangka membangun hubungan yang harmonis, demokratis, tetapi juga berkeadilan.

Selain itu, Dewan juga menyoroti masalah Tenaga Kerja Indonesia. DPR meminta Pemerintah memperkuat upaya diplomasi luar negeri, sehingga bisa mengurangi hukuman yang menimpa para TKI. Melihat begitu kompleksnya masalah TKI di Luar Negeri, DPR akan membentuk sebuah Tim Pengawas sebagai salah satu upaya Dewan dalam membantu menyelesaikan masalah ini.

Selain masalah TKI, kasus peredaran narkoba akhir-akhir ini telah sangat meresahkan, karena makin merasuk ke dalam setiap lapisan masyarakat. Mengingat bahaya yang sangat besar yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba ini, maka perlu tindakan tegas dengan memberikan hukuman yang seberat-beratnya bagi para pengedar. Pemberian grasi maupun remisi kepada terpidana narkoba, perlu dipertimbangkan kembali, walaupun hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang.**

KETUA DPR MARZUKI ALIE MINTA DEWAN BEKERJA KERAS CAPAI TARGET

Menyambut tahun 2013, Ketua DPR Marzuki Alie meminta semua anggota Dewan kembali bekerja keras dan mampu memberikan keteduhan yang dapat menentramkan hati rakyat.

“Kekuatan politik yang direpresentasikan oleh fraksi-fraksi, harus memberikan respon positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.” ujar Ketua DPR Marzuki Alie saat menyampaikan Pidato Pembukaan Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2012-2013, Senin, (7/1).

Menurut Marzuki, salah satu upaya yang dapat dilakukan segera, yaitu melaksanakan Program Aspirasi Rakyat, agar kinerja Dewan semakin efektif. Pimpinan Dewan berharap, dalam sisa waktu kurang dari dua tahun, lembaga ini dapat



terus menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya dan tidak terpengaruh oleh situasi politik menjelang Pemilu.

Dia menambahkan, kita semua harus menyadari bahwa amanah yang diberikan rakyat kepada kita, belum mampu jalankan dengan sebaik-baiknya, belum mampu sepenuhnya mewujudkan DPR sebagai lembaga perwakilan yang kredibel dalam mengemban tanggung jawab mewujudkan masyarakat yang makmur berkeadilan.

Pada Masa Persidangan III, selain melaksanakan tiga fungsi utama Dewan, lanjut Marzuki, ada beberapa pejabat publik yang perlu segera diproses penetapannya oleh Dewan, yaitu pencalonan Hakim Agung, Deputy Gubernur BI, dan Hakim Konstitusi.

Penetapan calon Hakim Agung adalah untuk mengisi kekosongan 5 (lima) Hakim Agung periode pertama, dan 4 (empat) Hakim Agung periode kedua, Komisi Yudisial telah mengajukan nama-nama calonnya, sesuai peraturan perundangan, yang akan segera ditangani oleh Komisi III melalui *fit and proper test*.

Berkenaan dengan pencalonan Hakim Konstitusi, tambahan, Badan Musyawarah DPR-RI telah menugaskan Komisi III DPR untuk segera membahasnya karena akan habis masa jabatannya pada 1 April 2013. Sesuai dengan ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terhadap penetapan Hakim Konstitusi ini, DPR akan melaksanakannya secara obyektif, transparan, dan partisipatif. (si)foto:wy/parle.

Komisi IX Minta APINDO Tidak Keluar Dari LKS Tripartit Nasional

Komisi IX DPR RI meminta Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai perwakilan dunia usaha dalam Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, tidak keluar dalam lembaga tersebut. Apindo berencana keluar karena merasa tidak diberikan peran oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) dalam lembaga LKS Tripartit.



Suasana RDP Komisi IX DPR dipimpin oleh wakil ketua Novariyanti Yusuf, didampingi ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning dengan Dirjen Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial dan APINDO di Jakarta, Rabu (9/1).

Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning menyangkan hal ini. Menurutnya, Kita semua bangsa Indonesia, kita tidak lahir di Singapore atau di luar negeri. Apapun yang terjadi kita ada di Indonesia, suka tidak suka kita bagian dari bangsa Indonesia.

“Pengusaha dan buruh, apabila egosentrisnya masing-masing diperkuat maka tidak akan ketemu, buruh selalu berbicara masalah kesejahteraan, selalu ingin kenaikan upah minimum tapi sama pengusaha sudah dianggap maximum,” papar Ning demikian sapaan akrabnya, dalam rapat dengar pendapat Komisi IX dengan Dirjen Pembinaan Hubungan Industri dan Jaminan Sosial (PHI dan Jamsos) Kemenakertrans dan APINDO, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (9/1)

“Namun meskipun APINDO mewakili pengusaha, tapi saya yakin di daerah sana masih ada sanak keluarga yang merupakan buruh. Sehingga, saya mengajak selagi masih punya kesempatan dan wibawa ada baiknya kita berbuat untuk kepentingan rakyat banyak.” tegas Ning.

Ning mendorong LKS Tripartit Nasional untuk lebih aktif dalam melakukan dialog dan komunikasi bersama guna mendapatkan keputusan terkait masalah ketenagakerjaan, antara lain kenaikan upah dan *outsourcing* yang memenuhi keadilan bagi semua pihak, sekaligus melakukan evaluasi terkait keberadaan perwakilan dari setiap unsur.

Senada dengan Ning, Anggota Komisi IX Dinajani Mahdi (F-PD) juga menyangkan rencana keluarnya APINDO dari LKS Tripartit. Menurutnya permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik, asalkan Kemenakertrans dan APINDO duduk bersama membicarakan permasalahan ini mencari jalan yang terbaik, baik untuk buruh maupun untuk pe-

ngusaha. “Sebab, ini bukan masalah yang ringan tapi krusial. Carilah *win-win solution*, kalau perlu kita undang juga KADIN karena kami rasa KADIN ada juga kepentingannya disini.” kata Dina.

Teman satu Fraksi Dina, Heriyanto, mempertanyakan alasan dibalik rencana pengunduran diri APINDO dari LKS Tripartit Nasional. Ia menyatakan bahwa LKS Tripartit adalah forum komunikasi, konsultasi, dan musyawarah ketenagakerjaan dan anggotanya adalah dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat buruh.

Heriyanto menegaskan LKS Tripartit dibutuhkan untuk menyamakan persepsi, membangun kepercayaan dalam kedudukan seimbang, proporsional demi memperjuangkan kepentingan bersama. “Apakah APINDO sudah mengangap tidak perlu lagi berkomunikasi dan berkonsultasi dengan pemerintah dan buruh? Apakah pengunduran diri ini akan menuntaskan masalah?” tandasnya.

Ia menambahkan, masalah kenaikan upah minimum yang melambung tinggi di beberapa provinsi sangat memungkinkan munculnya kisruh diantara buruh dan pengusaha. Hal ini akan memperbesar kemungkinan perusahaan yang bangkrut dan dapat membahayakan perekonomian negara.

Heriyanto meminta pihak APINDO untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap elemen-elemen di bawahnya, apakah semuanya sudah mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, Dirjen PHI dan Jamsos Kemenakertrans yang diwakili Sekretaris Dirjen, Iskandar Maula

menyampaikan bahwa pemerintah dalam hal ini sudah memiliki usaha-usaha mengatasi kemelut ini. Menurutnya, ketidakhadiran pihak APINDO sebanyak empat kali dalam sidang Badan Pelaksana (BP) justru membuat pemerintah bertanya-tanya sebenarnya apa yang terjadi.

“Oleh karena itu kita meminta penjelasan dari pihak APINDO lewat surat undangan yang kita kirim ke Sekretaris Umum APINDO. Namun ketika menyangkut masalah akur apa tidak, selama ini kami akur-akur saja, baik itu di LKS Tripartit Nasional ataupun di Dewan Pengupahan.” ungkapnya.

Sementara Ketua Dewan Pengupahan Nasioan (DPN) APINDO Bidang Advokasi, Hasanuddin Rahman, menyampaikan dengan tegas bahwa secara administratif DPN APINDO tidak pernah mengeluarkan surat keputusan untuk keluar dari LKS Tripartit.

Kemudian kalau pemerintah menyatakan bahwa semuanya sudah berjalan sesuai aturan dan sudah ada usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kemelut ini, namun mengapa KepMen Nomor 13 Tahun 2012 keluar tanpa mengindahkan aspirasi dari pihak APINDO dan sudah dua kali jalan sendiri.

Menurut Hasanuddin Rahman, setelah dilakukan survei oleh Badan Pengupah Nasional ditemukan ada empat komponen yang harus ditambahkan. DPN APINDO kemudian menerima ini, sehingga komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dari 46 ditambah empat menjadi 50. Tapi ternyata ada

pihak Serikat Pekerja dan Serikat Buruh yang tidak menerima, kemudian diambil alih Kemenakertrans. “Kemenakertrans tanpa konsultasi dengan pihak APINDO langsung menambahkan 10 lagi. Itulah alasan mengapa DPN APINDO menyatakan mundur,” terangnya.

“Mayoritas bapak-ibu dewan yang terhormat ini menginginkan kalau APINDO tidak keluar dari LKS Tripartit Nasional dan menurut catatan DPN APINDO bahwa LKS Tripartit ini merupakan amanat UU Nomor 13 pasal 107 tentang Pembentukan Lembaga Kerjasama Tingkat Nasional, jadi tidak mungkin APINDO senaif itu untuk langsung keluar” Jelasnya.

Sementara, Anggota DPN APINDO Endang Susilowati menyampaikan bahwa dalam Tripartit Nasional, pemerintah dalam hal ini Kemenakertrans tidak memerankan posisi yang sentral atau menjadi mediator antara kepentingan aspirasi dunia usaha dan serikat buruh. DPN APINDO memandang pemerintah berada pada posisi yang berat sebelah, hal ini bisa dilihat dalam pengambilan kebijakan secara sepihak penentuan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang semula 46 jenis menjadi 60 jenis KHL.

“Kami melihat peranan kami itu disepelekan, sejauh ini yang kami amati apa-apa yang disampaikan oleh dunia usaha itu tidak dipandang. Namun apabila tuntutan disampaikan oleh serikat buruh pemerintah akan mengabaikan begitu saja sekalipun harus melanggar undang-undang,” jelas Endang. (sc/de/ul)

DPR Siap Sambut Kunjungan Delegasi Parlemen Rusia ke Indonesia

Ketua DPR RI Marzuki Alie menyatakan menyambut baik niat pimpinan parlemen Rusia untuk berkunjung ke Indonesia. Harapannya kunjungan tersebut dapat meningkatkan hubungan kedua negara khususnya antar parlemen.



Ketua DPR Marzuki Ali di Gedung DPR Rabu (9/1) menerima kunjungan kehormatan dubes Rusia Mikhail Yurievich Galuzin.

“Kita menyambut baik rencana kunjungan tersebut. DPR sudah punya grup kerjasama bilateral dengan Rusia agar hubungan dua negara khususnya parlemen bisa meningkat. Rencana kunjungan ini bisa dibicarakan langsung dengan BKSAP DPR,” kata Marzuki saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Yurievich

Galuzin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (9/1/13).

la juga menyampaikan DPR akan mengirim delegasi ke Rusia untuk menghadiri kegiatan Forum Parlemen Asia Pasifik (APPF) ke-21 yang berlangsung di Kota Vladivostok, Rusia pada tanggal 27-31 Januari. Wakil Ketua DPR Pramono

Anung menurutnya akan memimpin delegasi Indonesia.

Pada bagian lain Ketua DPR meminta Dubes Mikhail dapat mendukung peningkatan kerja sama ekonomi antar dua negara. Ia menyebut dalam konteks perdagangan Indonesia saat ini masih defisit, impor dari Rusia hampir 3 kali lipat dibanding ekspor. Hal lain yang juga menjadi perhatiannya adalah kerja sama dibidang pendidikan terutama memberi peluang lebih besar kepada masyarakat Indonesia memperoleh beasiswa.

Dubes Rusia menjelaskan upaya meningkatkan kerja sama ekonomi dengan Indonesia sudah diupayakan. Akhir Desember lalu delegasi pengusaha Rusia dipimpin Wakil Menteri Perindustrian telah menghadiri pameran Manufaktur Indonesia. "Saya berharap dalam kegiatan tersebut terjalin kerja sama terutama antar pengusaha sehingga dapat mendorong peningkatan ekspor Indonesia ke Rusia," ungkapnya.

Ia juga memaparkan pemerintah Rusia saat ini memberikan peluang lebih besar kepada mahasiswa Indonesia untuk mengikuti program S3 disejumlah perguruan tinggi di negaranya. Pembicaraan tentang hal ini sudah dilakukan termasuk dengan organisasi Asosiasi Mantan Mahasiswa Indonesia di Rusia.

Perkenalkan Durian

Usai pembicaraan formal Ketua DPR RI memperkenalkan buah durian sebagai salah satu daya tarik wisata Indonesia. Ia juga meminta dubes untuk meningkatkan kerja sama mempromosikan pariwisata Indonesia di Rusia. "Tahun lalu

kunjungan turis Rusia baru 90.000 orang, semoga tahun ini bisa ditingkatkan menjadi diatas 100.000. Silahkan datang dan mencoba buah durian yang cita rasanya seperti Vodka minuman khas Rusia," kata Marzuki sambil menyerahkan bingkisan buah durian.

Dubes Mikhael menjelaskan bagi sebagian warga negaranya tujuan wisata Indonesia seperti Bali sudah sangat dikenal. Ia sendiri mengaku sudah beberapa kali berkunjung ke Pulau Dewata. "Saya sudah sering ke Bali dan mencintai atmosfirnya. Saya akan dukung agar lebih banyak warga Rusia berkunjung tidak hanya ke Bali tetapi juga pulau lain di Indonesia," pungkask dia. (iky), foto : eka hindra/parle/hr.



Ketua DPR memperkenalkan buah durian kepada dubes Rusia.

Pemerintah Diminta Buat Peringatan Resmi Penyebaran Virus Flu Burung

Berkaitan dengan adanya penyebaran Virus flu burung H5N1 Clade 2.3.2, Komisi IX DPR RI meminta Pemerintah (dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pertanian) membuat peringatan resmi atas penyebaran virus tersebut.

"Hal ini dimaksudkan agar masyarakat terutama peternak unggas waspada penularan virus berbahaya yang telah bermutasi tersebut," kata Endang Agustini Syarwan Hamid Anggota Komisi IX DPR RI.

Menurut Endang, kita sering menganggap biasa hal ini. Namun ternyata berdampak luar biasa. "Orang pasti akan mendengar berbeda antara surat edaran dan instruksi, karenanya mereka akan jadi lebih hati-hati," ujarnya.

Permintaan tersebut, disampaikan

Endang dalam rapat Panja Pengadaan Sarana dan Prasarana Pembuatan Vaksin Flu Burung untuk Manusia Komisi IX dengan Dirjen P3L, Dirjen BUK dan Kepala Balitbang Kementerian Kesehatan, Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (8/1)

Menanggapi hal ini, Dirjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Tjandra Yoga mengatakan, pihaknya akan segera melaksanakan instruksi dari Komisi IX tersebut dan akan memfokuskan untuk sosialisasi ke daerah-daerah di Indonesia mengenai kasus flu burung hasil mutasi H5N1 ini.

Menurutnya, walaupun di Indonesia belum ada kasus terhadap manusia, Kementerian Kesehatan tetap akan mem-



Anggota Komisi IX DPR Endang Agustini Syarwan Hamid.

berikan arahan kepada masyarakat agar waspada khususnya kepada para pedagang daging unggas di pasar tradisional. Karena di China dan Bangladesh sudah ada beberapa kasus yang terjadi. (sc), foto : wahyu/parle/hr.



KETUA DPR AJAK MASYARAKAT LEBIH CINTAI BUAH-BUAHAN PRODUK DALAM NEGERI

Ketua DPR Marzuki Alie mengajak masyarakat untuk lebih mencintai dan lebih banyak mengonsumsi buah-buahan produksi dalam negeri. Ternyata produksi buah-buahan dalam negeri tak kalah dengan buah-buahan impor.

Hal itu dikatakan Ketua DPR Marzuki Alie ketika bersama wartawan yang sehari-hari meliput kegiatan parlemen menikmati buah durian di Press Room DPR Senayan, Jakarta Rabu (9/1).

Di tengah-tengah kesibukannya sebagai Pimpinan Dewan, Ketua DPR berkesempatan menikmati buah durian yang khusus didatangkan dari Palembang Sumatera Selatan. Daerah di selatan Sumatera ini terkenal selain buah duku-

nya juga buah durian, yang pada saat ini tengah memasuki musim panen sehingga di wilayah Jakarta khususnya, selain durian buah rambutan banyak diujakan di wilayah Jakarta.

Sekitar seratus buah durian ditempatkan di meja kemudian Ketua DPR membuka secara simbolis dan langsung menikmatinya. Selanjutnya beramai-ramai wartawan menyantap buah yang terkenal menyengat aromanya.

Pernyataan Ketua DPR ternyata benar, buah-buahan lokal ternyata tidak kalah enak dengan buah-buahan impor. Keunggulan lainnya, buah-buahan produksi dalam negeri harganya lebih terjangkau ketimbang buah-buahan impor. (mp) foto: wy/parle.

DPR Dukung Penuh Keputusan MK Bubarkan RSBI



Ketua DPR memberi keterangan Pers yang mendukung penuh pembubaran RSBI.

"RSBI ini menimbulkan diskriminasi dalam pemberian proses dalam belajar mengajar. Seolah-olah siswa ini diberikan kekhususan, dan itu kelasnya sangat terbatas, itu bisa menimbulkan diskriminasi, padahal pendidikan harus diberikan yang sama kepada seluruh anak bangsa," ujar Ketua DPR Marzuki Ali kepada wartawan, Rabu, (9/1).

Terkait Pos Anggaran RSBI di Tahun 2013, lanjutnya, program tersebut dapat dijadikan perkuatan kepada sekolah-sekolah yang sifatnya bantuan, "Bantuan Hibah Bersaing" atau apa namanya. "Jadi sekolah-sekolah yang ingin meningkatkan kualitas sekolahnya bisa mengajukan bantuan dengan menggunakan dana tersebut," ujarnya.

Hal senada disampaikan, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, dirinya menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan aturan pengadaan Rintisan Sekolah Ber taraf Internasional (RSBI). Menurut Taufik penerapan RSBI selama ini memang terlalu banyak masalah.

"Kita sangat mengapresiasi kepu-

tusan *judicial review* terhadap keputusan mengenai masalah pembubaran RSBI tersebut," kata Taufik kepada wartawan baru-baru ini.

Dia mengatakan, selama ini banyak penyimpangan mengenai penerapan RSBI di daerah. RSBI juga menyebabkan terjadinya ketimpangan hak memperoleh pendidikan di Indonesia. "Karena sifat pendidikan kita harus bersifat general bahwa setiap anak bangsa berhak mendapat pendidikan dan status anggaran kita 20 persen untuk pendidikan di APBN kita," ujarnya.

Dia mengatakan, putusan MK itu harus segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. "Kami akan meminta kepada pimpinan Komisi X dan Mendiknas

Pimpinan DPR mendukung penuh keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 50 Ayat 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

terkait pelaksanaan dari *judicial review* ini," tuturnya.

Dia mengharapkan, agar sekolah tak mengakali putusan MK tersebut dengan membuat sekolah yang serupa dengan nama berbeda. "Jadi jangan sampai ketika RSBI itu dibubarkan tetapi muncul istilah lain yang menjadi akal-akalan untuk menyamakan konsep RSBI tersebut," tutupnya. (as/si)



Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan, juga mendukung pembubaran RSBI.

DPR AKAN FASILITASI KISRUH PSSI DENGAN PEMERINTAH

Komisi X DPR bukan Lembaga pengambil keputusan, namun Komisi X DPR tetap akan memfasilitasi dan menindaklanjuti rapat dengan pemerintah, Komisi X DPR juga secepatnya mengundang Plt Menteri Pemuda dan Olahraga serta Koni, agar kisruh yang berkepanjangan di tubuh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) segera diselesaikan dengan baik.



Komisi X DPR menerima masyarakat persepakbolaan Indonesia menyangkut kisruh PSSI.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur, saat menerima Masyarakat Persepakbolaan, di ruang rapat Komisi X DPR Senayan Selasa (8/1) sore.

Wakil Ketua Komisi X DPR Asman Abnur menambahkan, bahwa dalam minggu-minggu ini Komisi X DPR sudah menjadwalkan Rapat Kerja (Raker) dengan pemerintah, namun Komisi X DPR masih menunggu kesediaan Pemerintah kapan bisa dilakukan Raker dengan Komisi X DPR.

Dia berharap mudah-mudahan semua masalah yang ada di tubuh persepakbolaan ini segera dapat diselesaikan dengan cepat dan tidak ada yang merasa dimenangkan atau merasa dikalahkan, semua ini bertujuan untuk menyelamatkan persepak

bolaan kita di masa depan.

Semua pihak harus didengar sekalipun dari pihak PSSI pun juga keterangan-keterangan dari kawan-kawan Voter Solo yang kesemuanya itu harus ada akhir penyelesaiannya, maka dari itu Pemerintah di harapkan bertindak tegas agar supaya segera selesai masalah ini.

Sementara pengurus Sepakbola Seluruh Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dwie mengatakan pernyataan sikap yang mengatasmakan Voter Solo, pertama pada hakekat dan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia adalah merupakan klub-klub sepakbola yang terhimpun dari Sabang sampai Merauke. Dan dirinya adalah pemilik klub-klub sepakbola di Indonesia dan pemangku kegiatan PSSI di Indonesia, sehingga dialah pemilik sah PSSI.

Dia juga menegaskan, sebagai pemilik hak suara (voter) PSSI, yang dikenal dengan penyebutan Voter Solo, yang terdiri dari Pemilik Klub ISL, Divisi Utama, Divisi I, II dan III, serta Pengurus Propinsi PSSI di seluruh Indonesia.

Voter Solo juga menyatakan telah menjatuhkan Mosi

Tidak Percaya kepada Kepengurusan Djohar Arifin pada 1 Desember 2011, dan pihaknya telah melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai statuta PSSI, di Ancol Jakarta pada 1 Maret 2012, untuk memilih Kepengurusan baru pengganti Djohar Arifin, yaitu Kepengurusan PSSI periode 2012-2016 dibawah Ketua Umum La Nyalla Mahmud Mattalitti.

Untuk itu tegas Dwie, pihaknya meminta kepada Komisi X DPR, setelah mencermati dan mempelajari fakta-fakta yang terjadi, untuk mengambil langkah dan mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk tidak mengakui keberadaan Kepengurusan Djohar Arifin. Selain itu, mendesak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mengesahkan Kepengurusan PSSI hasil KLB Ancol di bawah Kepemimpinan La Nyalla Mahmud Mattalitti dengan melakukan pelantikan oleh Ketua Umum KONI.

Voter Solo juga mendesak Plt Menteri Pemuda dan Olahraga untuk menghentikan semua bantuan dan fasilitas negara kepada PSSI Djohar Arifin, dan membentuk Badan Tim Nasional sebagai badan ad-hoc dalam masa transisi untuk menyiapkan serta mengelola Tim Nasional Indonesia dalam menghadapi even Pra Piala Asia. (Spy).



Wakil Ketua Komisi X, Asman Abnur, menerima berkas dari perwakilan masyarakat persepakbolaan Indonesia.

Komisi XI DPR Segera Bahas RUU Usaha Perasuransian

Komisi XI DPR segera akan membahas RUU usaha Perasuransian revisi UU No. 2 tahun 1992 tentang Asuransi. "RUU bertujuan untuk mengharmoniskan dengan posisi dan kelembagaan OJK persatu Januari 2013, karena itu Bapepam LK dan usaha perasuransian nantinya berada dalam pengaturan dan pengaturan OJK," ujar Wakil Ketua Komisi XI DPR Andi Timo Pangerang kepada wartawan, di Gedung DPR, Rabu, (9/1).

Terkait jumlah asuransi di Indonesia, menurut Andi, asuransi umum mencapai 80 perusahaan, asuransi jiwa 47 perusahaan, asuransi jiwa syariah 5 perusahaan. Namun yang patut disayangkan bahwa hampir 80 persen dikuasai oleh pemodal asing.

"Aspirasi mereka menginginkan bahwa tetap komposisi itu, karena perusahaan asuransi perlu modal, dan kendala kita di lokal bagaimana memenuhi modal tersebut," paparnya.

Dia menambahkan, persoalan modal masih menjadi kendala bagi pengusaha asuransi lokal karena itu, kita ingin mengeluarkan UU yang bermanfaat dan komprehensif serta dibutuhkan oleh industri asuransi.

Hal yang harus difokuskan didalam RUU ini, lanjutnya, yaitu Perlindungan konsumen, serta edukasi kepada konsumen. Pasalnya, penetrasi asuransi di masyarakat masih rendah hanya empat persen, artinya masih sebagian besar penduduk Indonesia belum sadar asuransi. "RUU ini akan memasukkan adanya perlindungan konsumen dimana perusahaan-perusahaan asuransi ini wajib menjadi peserta penjaminan dari lembaga penjamin simpanan," tambahnya.

Dia mengatakan, pertumbuhan asuransi di Indonesia mencapai 20 persen setiap tahunnya. Hal itu menandakan bahwa potensi pasar asuransi Indonesia sangat luas, karena penetrasi



Wakil Ketua Komisi XI DPR, Andi Timo Pangerang, memimpin pertemuan dengan Asosiasi Asuransi Umum.

asuransi kepada masyarakat masih 4 persen yang sadar asuransi.

"Pertumbuhan tersebut diharapkan ada penyebaran. Selain ada pertumbuhan premi maupun asetnya tentu harus ada pertumbuhan nasabahnya. Jadi ada penetrasi kepada seluruh masyarakat," ujarnya. (as/si)



Perwakilan Asosiasi Asuransi Umum.

Komisi IX Minta RSAB Harapan Kita Dikenakan Sanksi

Komisi IX DPR RI minta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan sanksi tegas kepada manajemen Rumah Sakit Anak dan Bunda (RSAB) Harapan Kita atas kasus penggunaan area rumah sakit untuk syuting sinetron "Love in Paris" pada tanggal 26 Desember 2012, selambat-lambatnya tanggal 25 Januari 2013.



Dirjen Bina Usaha Kesehatan Kemenkes, Supriyantoro, Dirut RSAB Harapan Kita, Subagio dan Ketua IDI, Marsis.

Hal tersebut merupakan keputusan Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan Dirjen Bina Usaha Kesehatan Kemenkes Supriyantoro, Dirut RSAB Harapan Kita Achmad Subagio dan Ketua Ikatan Dokter Indonesia Marsis di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/1)

Rapat Komisi IX yang dipimpin langsung Ketua Komisi IX Ribka Tjiptaning membahas kasus meninggalnya seorang pasien di RSAB Harapan Kita Ayu Tria Desriani dan meminta penjelasan mengenai pemanfaatan ruangan di RS untuk keperluan komersil.



Ketua Komisi IX DPR, Ribka Tjiptaning.

Selain diminta memberikan sanksi kepada RSAB Harapan Kita, Kementerian Kesehatan diminta merumuskan dan mensosialisasikan regulasi terkait keamanan, keselamatan dan kenyamanan di rumah sakit, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP dan sistem manajemen RS.

Anggota Komisi IX yang hadir dalam rapat tersebut, menyesalkan area rumah sakit dijadikan lokasi syuting, karena dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kenyamanan pasien. Anggota Komisi IX juga meminta RSAB Harapan Kita diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anita Yakoba Gah (F-PD) menyesalkan hal yang dilakukan RSAB Harapan Kita. "Seharusnya dipikirkan bahwa kegiatan shooting akan mengganggu pasien," katanya.

Anggota Komisi IX dari F-PDIP Carolin Margret Natasha meminta kasus ini tidak terulang kembali dan mengusulkan dibuatnya UU tentang Perlindungan Pasien. "Saya minta hal ini tidak terulang dan jangan sampai kegiatan shooting menjadi sumber pendapatan lain bagi RS," ujarnya.

Sementara Arif Minardi (F-PKS) menyatakan, bahwa RSAB Harapan Kita telah melanggar Pasal 5 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. "Masih beruntung pasiennya hanya satu, bagaimana kalau banyak. Walau bagaimanapun kegiatan tersebut mengganggu pelayanan pasien," imbuhnya.

Anggota Komisi IX Hang Ali Saputra Syah Pahan (F-PAN) mempertanyakan, bagaimana mungkin Production House (PH) "Love in Paris" tidak memiliki ijin tertulis dari RSAB namun tetap melaku-



Carolin Margret Natasha

kan kegiatan shooting. "Hal ini karena tidak adanya aturan khusus. Kemenkes harus membuat regulasi yang harus ditaati seluruh RS," tegasnya.

Sedangkan Muchtar Amma (F-Han-ura) mempertanyakan prosedur pemberian ijin. Pasalnya menurut keterangan Dirut RSAB Harapan Kita, dirinya belum mengeluarkan ijin tertulis. "Kalau tidak berdasarkan prosedur, hal ini cenderung dapat menyebabkan kelalaian dalam pelayanan," tukasnya.

Okky Asokawati (F-PPP) menanyakan bagaimana kiprah Komite Keselamatan Pasien terkait kasus ini, dan bagaimana dengan mekanisme sistem komplain. Menurutnya PH membuat seting rumah sakit sendiri. "Kenyamanan rumah sakit adalah hal yang esensial, apa yang sudah dilakukan Komite Keselamatan Pasien dan bagaimana dengan respon Dewan Pengawas di RSAB," paparnya.

Poempida Hidayatullah (F-PG) menyatakan kasus ini bukan hanya masalah etika tapi juga *miss management*. Poempi meminta RSAB Harapan Kita harus diberikan sanksi dengan tidak menghilangkan kasus pidananya, dan meminta dilakukan penyidikan. (sc) foto:wy/parle.

DPR Desak Pungli di KUA Segera Dihentikan

Anggota DPR Hidayat Nurwahid mendesak agar pungutan liar (pungli) yang dilakukan petugas KUA dalam masalah pernikahan harus segera dihentikan. Hal ini menjadi masalah bagi Kementerian Agama karena tidak mensosialisasikan biaya pencatatan pernikahan dengan maksimal.



Anggota DPR, Hidayat Nurwahid, menjawab pers mengenai pungli di KUA.

“Prinsipnya, saya setuju dengan Irjen Kemenag Muhammad Yasin bahwa pungli ini harus dihentikan melalui beragam cara. Diantaranya adalah rakyat harus diberitahu bahwa sesungguhnya biayanya rendah sekali, 30 ribu rupiah saja,” tandas politisi PKS di Jakarta, Senin (7/1) siang.

Sebelumnya Irjen Kemenag M Yasin mengungkapkan adanya pungli yang dilakukan petugas dari KUA mencapai Rp.1,2 triliun. Pungli itu terjadi kebanyakan ketika penghulu meminta ongkos menikahkan dari pasangan yang telah mendaftarkan ke KUA, taripnya bervariasi dari Rp.500. ribu sampai Rp3, juta padahal ongkos resmi yang ditetapkan oleh Kementerian Agama hanya 30 ribu rupiah.

Menurut Hidayat, kalau kemudian diperlukan anggaran operasional, supaya menutup terjadinya pungli atau gratifikasi, seharusnya pihak kementerian agama menyediakan anggaran yang memungkinkan agar KUA bisa melakukan perannya dengan maksimal.

Bisa dibayangkan, sambungnya, jika kemudian mereka tidak mau datang ke daerah untuk menikahkan orang, hanya karena tidak ada anggaran operasional, bagaimana orang-orang di lapangan. Mereka tidak nikah atau mereka harus nikah siri?

“Jangan dijadikan alasan buat nikah siri karena petugas KUA nya tidak ada, ini tidak boleh terjadi. Karenanya Komisi VIII DPR segera mendukung untuk menyelesaikan masalah hal ini, kita berharap dalam Rapat Kerja di minggu-minggu

pertama dengan pihak Kementerian Agama hal ini sudah disiapkan, termasuk juga akan mendatangkan Irjen Kemenag Mohamad Yasin,” ujarnya.

Ditambahkan, masalah ini menjadi salah satu yang akan ditangani secara serius termasuk isu terkait dengan laporan PPAK soal temuan dana pengelolaan haji. “ Kami juga akan persoalkan tentang itu supaya Kementerian Agama benar-benar bisa menjadi teladan sebagai Kementerian yang *good dan clean government*,” ujarnya.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi VIII DPR Jazuli Juwaini mengatakan, yang perlu dibenahi sistem pelayanannya. Yang dimaksud dengan sistem pelayanan sebenarnya dalam undang-undang, kewajiban KUA atau kementerian agama adalah mencatat sebuah kejadian pernikahan yang beragama Islam kemudian dikeluarkan buku nikahnya.

Tradisi selama ini petugas KUA juga memberikan khutbah nikah, bahkan kadang-kadang juga menggantikan jadi wali. Padahal walinya ada. “ Menurut saya harus diubah, mereka tidak perlu hadir di acara pernikahan itu. Mereka cukup menerima laporan dengan syarat-syarat yang ditentukan. Umpamanya si A akan menikah dengan si B mau menikah tanggal sekian. Orang lapor di kantor KUA, diverifikasi syaratnya, setelah itu dicetak buku nikahnya sesuai dengan jam dan tanggal pernikahannya,” jelas dia.

Menurut Jazuli, pelayanan publik buku nikah itu perlu dipampang di seluruh kantor KUA. Proses pembuatan dan pencetakan kartu atau buku nikah itu juga ditentukan waktunya. “Jadi yang dibutuhkan pencatatan dan memproduksi buku nikah, kalau jumlahnya besar dan dicetak kolektif biayanya akan lebih murah,” jelas Pimpinan Komisi VIII DPR. (Spy, mp)/foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini.

DPR Minta Temuan PPATK Ditindaklanjuti

Sejumlah anggota Komisi III memberi apresiasi terhadap temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut hasil analisis 106 laporan yang diduga hasil korupsi dan pencucian uang 69,7 persen



Nudirman Munir.

diantaranya melibatkan anggota DPR/ DPRD. Namun hasil analisis transaksi ini diminta jangan berhenti pada laporan pada publik semata tetapi harus ditin-

dakkanjuti aparat penegak hukum.

“Laporan itu menurut saya masuk akal jadi kita apresiasi, tetapi jangan sekedar pengumuman saja. Kita minta aparat penegak hukum menindaklanjuti, kalau tidak akhirnya hanya jadi fitnah,” kata anggota Komisi III DPR RI Nudirman Munir di Jakarta, Selasa (8/1/13).

Ia menenggarai transaksi itu terjadi melibatkan sejumlah pihak seperti pejabat kementerian teknis terkait, kementerian keuangan serta anggota legislatif. Kongkalikong seperti itu menurutnya cenderung terjadi pada anggota partai yang berkuasa sedang yang lainnya hanyalah ikut-ikutan.

Sementara itu bicara pada kesempatan berbeda anggota Komisi III dari Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari mengingatkan transaksi yang dianalisis PPATK tidak otomatis adalah korupsi.

“Ada aturan dalam perbankan tran-

saksi diatas Rp 100 juta harus dilaporkan, maka setiap transaksi di atas Rp 100 juta sudah masuk kategori mencurigakan lalu diindikasikan korupsi. Jadi perlu ada penegasan dari penyidik status transaksi-transaksi tersebut,” jelasnya.

Baginya walaupun merepotkan secara administrasi langkah itu berguna untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pejabat publik. Sedangkan analisis yang dilakukan PPATK tersebut penting untuk mempersempit

ruang perilaku koruptif dan m e m b e n a h i sistem penganggaran. (iky)/ foto:iwan armanias/parle.



Eva Kusuma Sundari.

Pimpinan DPR Apresiasi Anggota Kembalikan Gratifikasi 700 juta

Pimpinan DPR mengapresiasi positif tindakan salah seorang anggota DPR dari Partai Demokrat yang mengembalikan uang gratifikasi sebesar Rp. 700 juta ke KPK.

“Itu harus menjadi contoh tak hanya bagi anggota DPR, tetapi juga lembaga lainnya,” ujar Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso kepada wartawan, di Gedung DPR, Selasa, (8/1).

Dia mengatakan, secara pribadi Priyo mengapresiasi anggota DPR yang mengembalikan uang tersebut. “Saya agak terkejut juga ada yang mendapat hadiah sebesar itu,” paparnya.

Sebelumnya, dalam siaran Persnya, Juru bicara KPK Johan Budi KPK menjelaskan seorang anggota FPD DPR ‘Mr X’ mendapatkan penghargaan dari KPK karena mengembalikan gratifikasi RP 700 juta. Anggota DPR tersebut mengembalikan gratifikasi terbesar sepanjang 2012.

Selain kepada anggota DPR dari Partai Demokrat itu, KPK juga memberikan penghargaan kepada sejumlah pihak lainnya. Mereka yang mendapat penghargaan itu antara lain Kementerian Keuangan sebagai kementerian dengan laporan terbanyak, Bank Jabar Banten sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang paling banyak melapor, Sekretariat DPR, dan seorang pegawai Bank Jabar Banten Kantor Cabang Pembantu Pangandaran dengan laporan gratifikasi

yang nilainya paling kecil. Sepanjang 2012 ini, KPK menerima 1.158 laporan gratifikasi. Dari ribuan laporan tersebut, 643 di antaranya sudah diproses. (si)/foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso.



Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso menyerahkan palu sidang kepada Wakil Ketua Komisi III yang baru Al Muzammil Yusuf.

Al Muzammil Resmi Wakil Ketua Komisi III

Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso memimpin rapat pleno Komisi III dengan agenda mengesahkan Al Muzammil Yusuf sebagai wakil ketua komisi yang baru. Langkah ini sesuai surat dari Fraksi PKS kepada Pimpinan DPR yang ingin melakukan mutasi anggota.

“Jadi intinya Fraksi PKS menugaskan Almuzammil Yusuf di Komisi III sekaligus menggantikan Nasir Djamil selaku Wakil Ketua Komisi. Jadi apakah surat dari Fraksi PKS yang mengusulkan Almuzammil Yusuf sebagai Wakil Ketua dapat disetujui?” tanya Priyo. Seluruh peserta rapat kemudian menyatakan persetujuannya.

Kepada peserta rapat Wakil Ketua DPR Bidang Korpolkam ini menyampaikan agar komisi yang membidangi masalah hukum ini dapat menjaga kinerja pada tahun yang baru 2013, sesuai harapan publik. Komisi III diharapkan tidak ragu untuk mengingatkan mitra kerja untuk konsen dalam menjalankan tugas konstitusional. “Parlemen tugasnya di negara manapun memang bicara, nyubit pemerintah. Mitra kerja perlu bekerja lebih efektif, jangan banyak omong,” tandasnya.

Kepada wartawan usai sidang Almuzammil Yusuf menyatakan akan melaksanakan amanat yang diembannya dengan sebaik-baiknya. Ia menyebut Komisi III adalah rumah lama karena pada periode 2004-2009 pernah bertugas di komisi hukum ini.

“Iya, saya dulu pernah di Komisi III juga sebagai wakil ketua. Mitra kerjanya juga masih sama kecuali sekarang ada penambahan BNPT. Jadi bagi saya ini penyegaran kembali, balik kandang,” ungkapnya.

Pada bagian lain ia menambahkan fokus utama tugas pada masa sidang sampai April nanti adalah menyelesaikan dua produk legislasi yaitu RUU Kejaksaan dan RUU Mahkamah Agung. Disamping itu Komisi III juga akan melaksanakan *fit and proper test* 24 orang calon hakim agung. “Doakan saya, insya Allah tugas ini dapat dilaksanakan dengan baik,” pungkasnya. (iky).



Anggota Komisi VII DPR dari Partai Golkar Satya Widya Yudha mengatakan, sektor ESDM pada tahun 2013 diwarnai oleh kenaikan Tarif Tenaga Listrik (TTL) rata-rata sebesar 15 persen pada tahun 2013 hanya untuk pelanggan kategori 1300 KVA ke atas. Golongan pelanggan 450 KVA dan 900 KVA tidak mengalami kenaikan.

“DPR meminta Kenaikan TTL oleh pemerintah harus dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan suasana kebatinan masyarakat,” ujarnya kepada Tim Parle.

Menurutnya, skema kenaikan TTL harus dilakukan secara bertahap untuk mengantisipasi gejolak inflasi. Kenaikan TTL setiap triwulan lebih rasional jika dibandingkan dengan

penaikan sekaligus dalam satu tahun.

“Kita mendorong penggunaan/pemanfaatan energi *mix* seperti panas bumi (*geothermal*) dan air sebagai pengganti bahan bakar minyak (BBM) untuk mengoptimalkan pembangkit listrik,” jelasnya kepada parle baru-baru ini.

Dia menambahkan, perlu adanya penerapan skema *feed in tariff* untuk menunjang program elektrifikasi nasional yang lebih *feasible*. Dengan menerapkan kebijakan *feed-in tariff*, harga listrik di setiap daerah berbeda-beda bergantung pada nilai investasi, kapasitas pembangkit, dan jenis energi terbarukan yang dimanfaatkan.

Tren Subsidi Energi

Sementara, Satya menjelaskan, tren subsidi energi kedepan selalu mengalami peningkatan dalam setiap penetapan anggaran. Dalam APBN 2012, subsidi energi sebesar Rp 168,5 triliun yang terdiri dari subsidi BBM Rp 123,5 triliun dan subsidi listrik Rp 45 triliun.

Dalam APBN-P 2012, subsidi energi membengkak menjadi Rp 225 triliun, untuk subsidi BBM sebesar Rp 137,37 triliun dan Rp 65 triliun untuk subsidi listrik (cadangan fiskal Rp 23 triliun). Sementara itu, subsidi energi dalam APBN 2013 juga membengkak menjadi Rp 274,7 triliun. Dari besaran tersebut, subsidi BBM Rp 193,8 triliun dan Rp 80,9 triliun.

“Pemerintah harus melakukan pengelolaan anggaran subsidi energi khususnya subsidi BBM secara ketat untuk menghindari terjadinya pembengkakan pada APBN berjalan 2013,” ujarnya.



Anggota DPR (F-PC), Satya Widya Yudha.

Disisi lain, jelasnya. Pemerintah harus merubah paradigma subsidi BBM. Saat ini, pola subsidi masih terfokus pada harga BBM, padahal BBM bersubsidi banyak disalahgunakan dan tidak tepat sasaran karena harganya

terlalu murah. Ke depan, pemerintah harus merancang program subsidi langsung yang bisa tepat sasaran kepada penduduk berpenghasilan rendah dan miskin. Bukan BLT, melainkan dalam bentuk *cash transfer* (berdasarkan data akurat kependudukan).

Dia menambahkan, harus dilakukan efisiensi terhadap *cost operasional* PLN, berdasarkan hasil audit investigatif BPK yang menemukan adanya pemborosan pengelolaan energi primer di PLN tahun 2009/2010 mencapai Rp 37 triliun. “Kita mengusulkan bahwa subsidi BBM dialihkan secara bertahap dalam lima tahun ke depan untuk subsidi energi terbarukan dalam rangka membangun ketahanan energi,” jelasnya.

Sementara terkait BBM Bersubsidi, jelasnya, perlu adanya pengawasan terhadap pola distribusi terbuka BBM bersubsidi selama ini masih lemah. Pemerintah harus konsisten dan tegas melakukan pengawasan. “Manajemen volume BBM bersubsidi perlu dilakukan melalui pengendalian volume dengan menggunakan sistem IT. Per kendaraan diberi jatah per volume per hari,” jelasnya.

Selain itu, disparitas harga antara BBM bersubsidi dan BBM non-subsidi yang terlalu tinggi bisa mengakibatkan gejolak sosial dan kekisruhan. Karena itu, Pemerintah harus berani dan tegas melakukan penyesuaian terhadap harga BBM bersubsidi karena telah diberi kewenangan di dalam UU APBN 2013,” tambahnya. (si)/foto:iwan armanias/parle.

Banyak Kesamaan Antara Kazakhstan dan Indonesia

Ketua DPR RI Marzuki Ali menerima kunjungan Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia yang baru, Beibut Atambulov di ruang kerjanya pada Kamis (10/1).

Marzuki menjelaskan bahwa hubungan diplomasi antara Indonesia dan Kazakhstan bertahun-tahun tidak mengalami peningkatan, tetapi secara signifikan terjadi hubungan diplomasi yang kuat sejak kunjungan Presiden Kazakhstan Nursultan Nazarbayev ke Indonesia pada April 2012 lalu. “Hampir 20 tahun hubungan diplomasi kita mati suri, tetapi sejak kunjungan Presiden Kazakhstan ke Indonesia, maka

hubungan menjadi kuat, antara lain ditandai dengan dibukanya Kedutaan Besar Kazakhstan di Jakarta saat itu juga” ujarnya.

Lebih lanjut Kazakhstan mempunyai banyak kesamaan dalam berbagai aspek dengan Indonesia, diantaranya kata Nazarbayev mengenai Kazakhstan yang 70 % penduduknya adalah muslim. “Kurang lebih keadaan di negara kami sama dengan di Indonesia. Penduduk kami mayoritas muslim, dan kami terus menjaga agar tidak terjadi diskriminasi antar golongan yang ada. Memang perlu banyak pengenalan dan pengakraban tentang Kazakhstan di

Duta Besar Kazakhstan yang menurutnya sangat atraktif dan menguasai tentang potensi yang dimiliki oleh Kazakhstan. Dia berharap, kedepannya Indonesia dapat memanfaatkan hubungan yang lebih baik.

Kazakhstan memiliki wilayah yang lebih luas dari Indonesia dengan penduduk yang lebih sedikit, yaitu 16 juta jiwa. Dengan demikian pendapatan per kapitanya termasuk tinggi, sehingga mempengaruhi negara-negara di sekitarnya dimana banyak sekali tenaga kerja yang masuk ke Kazakhstan. Indonesia melihat potensi Kazakhstan ada pada sumber daya energinya.

“Khususnya di bidang energi, saya sampaikan Pertamina juga sudah masuk ke Kazakhstan. Insya Allah dalam waktu dekat ini akan difinalkan untuk kerjasama dalam rangka eksplorasi migas di Kazakhstan. Selain itu adanya produk makanan kita yaitu mie instan yang resmi tembus pasar perdagangan Kazakhstan” jelas Marzuki. (ray)



Ketua DPR, Marzuki Ali, menerima Dubes Kazakhstan, Beibut Atambulov.

BKSAP Gelar Dialog dengan Parlemen Polandia

Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR-RI dipimpin Ketuanya Surahman Hidayat di Ruang Rapat BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (7/1) siang menggelar dialog dengan Delegasi Parlemen Polandia. Dalam acara tersebut dibahas mengenai peningkatan hubungan kedua negara khususnya antara DPR-RI dengan Parlemen Polandia.

Ketua BKSAP Surahman Hidayat yang didampingi antara lain Hayono Isman, Sidarto Danusubroto dan Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR dengan Parlemen Polandia Bobby Adhityo Rizaldi menyambut baik kerja sama parlemen kedua negara dan bisa ditingkatkan ke bidang lain baik ekonomi, pariwisata dan sektor lainnya. Untuk itu GKSB DPR akan melakukan kunjungan ke Polandia pada waktu yang tepat.

Menanggapi hal ini Ketua Delegasi Parlemen Polandia Krzysztof Klosowski yang didampingi Dubes Polandia untuk Indonesia mengharapkan kedua grup kerja sama parlemen baik GKSB DPR maupun Polandia untuk mengulas hal-hal yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Karena itu akan lebih baik jika diadakan ulasan mengenai hal-hal yang ingin dikembangkan dan kerja sama kedua negara.

Krzysztof lebih lanjut mengatakan, tingginya jumlah ang-

gota GKSB baik DPR maupun Parlemen Polandia dari berbagai komisi menunjukkan tingginya minat anggota Parlemen Polandia untuk terus meningkatkan hubungan dengan Indonesia.

Parlemen kedua negara tercatat telah beberapa kali melakukan kunjungan diplomatiknya, sejak tahun 2000 DPR telah melakukan sembilan kunjungan ke Polandia baik Komisi I, kunjungan teknis maupun kunjungan muhibah maupun GKSB. Sementara Parlemen Polandia tercatat mengunjungi Indonesia sedikitnya tiga kali sejak tahun 2000.

Mengenai pembentukan GKSB Polandia pada periode 2009-2014, dimaksudkan untuk meningkatkan hubungan dan kerja sama antara DPR dengan Parlemen Polandia. DPR mendorong peningkatan investasi kedua negara, khususnya dalam bidang-bidang strategis seperti bidang pertahanan dan energi termasuk energi terbarukan.

DPR juga melihat masih belum tergarapnya bidang pariwisata sebagai salah satu potensi yang bisa dikembangkan. Untuk diketahui, destinasi pariwisata Indonesia tidak sepadar Bali mengingat Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. (mp)/foto:iwan armanias/parle.



Suasana pertemuan BKSAP DPR dipimpin Ketuanya Surahman Hidayat dengan delegasi parlemen Polandia dipimpin Krzysztof Klosowski di gedung DPR Senin (7/1).

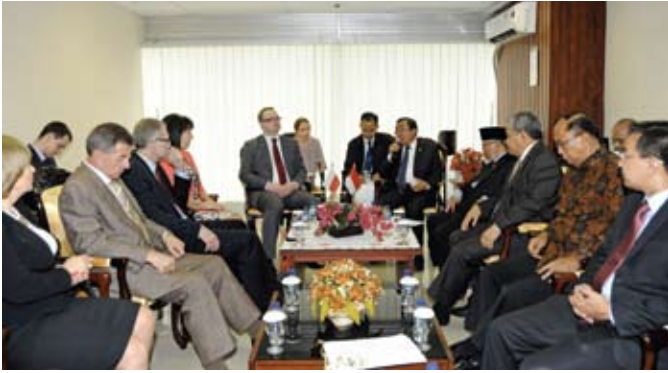
Polandia Adalah Salah Satu Sahabat Terpenting Indonesia di Eropa

Polandia adalah salah satu negara terpenting Indonesia di kawasan Eropa. Ini terbukti hubungan kedua negara sudah terjalin sejak 58 tahun yang lalu, yakni sejak hubungan diplomatik dibuka tahun 1955.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ketika menerima kunjungan Delegasi Parlemen Polandia dipimpin Krzysztof Klosowski, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senin (7/1).

Menurut Priyo, hubungan kedua

negara terus berkembang dengan ditandai posisi saling kunjung pejabat tinggi kedua negara baik parlemen maupun eksekutif diantaranya kunjungan Presiden Soekarno tahun 1959, Presiden Megawati tahun 2003. Sebaliknya kunjungan balasan juga dilaku-



kan Presiden Polandia Alexander Zawadski tahun 1961 dan Presiden Lech Walesa tahun 2010.

Lebih lanjut kata Pimpinan DPR Koordinator Politik, hubungan baik itu juga ditandai dengan bantuan Polandia terhadap Indonesia untuk bencana Tsunami Aceh dan Sumatera Utara tahun 2004 dan gempa bumi Yogyakarta tahun 2006.

Meski demikian Priyo berharap hubungan di bidang ekonomi dan perdagangan perlu ditingkatkan lagi mengingat neraca perdagangan masih kecil. Data dari Badan Penanaman modal Polandia, nilai investasi Indonesia di Polandia sampai kuartal I tahun 2012 tercatat USD 7 juta pada sektor elektronik dan usaha peti kemas. Sementara investasi Polandia di Indonesia tercatat USD 155 juta pada sektor pertambangan batu bara, furniture dan pertanian.

Pada kesempatan ini Priyo mengharapkan perlunya hubungan kedua parlemen terus ditingkatkan sebagai *second track diplomacy* untuk pengembangan kerjasama kedua negara dengan menjalin dan menambah intensitas saling kunjung parlemen kedua negara.

Delegasi Parlemen Polandia juga berkesempatan menghadiri Sidang paripurna DPR yang bertepatan dengan Pembukaan Masa Persidangan III tahun sidang 2012/2013 dan mendapat sambutan hangat para anggota Dewan yang hadir dalam acara tersebut.

Delegasi Parlemen Polandia selanjutnya mengadakan dialog dengan Badan Kerja Sama Antara Parlemen (BKSAP) DPR-RI dan Komisi I DPR serta akan mengunjungi Bandung dan Bali. (mp)/foto:iwan armanias/parle.



Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santosa dan pimpinan BKSAP menerima kunjungan delegasi parlemen Polandia.

Komisi X Minta Pemerintah Tunda Implementasi Kurikulum 2013

Anggota Komisi X DPR RI Reni Marlinawati meminta kepada Pimpinan DPR mendesak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menunda implementasi kurikulum 2013, yang akan dilaksanakan pada 5 bulan kedepan.

Dalam Rapat Paripurna DPR, Senin, (7/1), Reni mengoreksi Pidato Pembukaan Ketua DPR RI Marzuki Alie, yang menurutnya, seolah-olah kurikulum tersebut akan diuji cobakan selama 3 tahun sebagai proses transisi agar proses perubahan dapat berjalan mulus.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan Reni, menyampaikan bahwa Pemerintah tidak akan pernah melakukan uji coba kurikulum 2013, tetapi akan langsung mengimplementasikan di tahun 2013, pada 30% seluruh Sekolah Dasar di seluruh Indonesia.

Reni Marlinawati mengatakan, mayoritas Anggota Komisi X DPR tidak menyetujui kurikulum 2013, Alasannya, pertama kurikulum 2013 dilakukan tanpa terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kurikulum sebelumnya. Kedua, tanpa dilakukan sosialisasi terlebih dahulu. Ketiga, disaat komisi X melakukan penyerapan aspirasi di berbagai daerah, kesiapan guru dalam sarana dan prasarana masih sangat belum siap sehingga Implementasi kurikulum 2013 telah menimbulkan keresahan dikalangan guru dan masyarakat.

Dia menegaskan komisi X telah meminta untuk membandingkan atau mengevaluasi kurikulum yang lama, sehingga anggaran dengan peruntukan bagi pelatihan guru sebesar Rp. 500 Miliar ditunda terlebih dahulu menunggu rekomendasi Panitia Kerja



Anggota Komisi X DPR, Reni Marlinawati.

Kurikulum di Komisi X bidang Pendidikan DPR RI.

Dia mengingatkan pemerintah jangan gegabah perubahan kurikulum ini diperlukan kehati-hatian, menurutnya diperlukan sosialisasi sekurangnya 3 tahun untuk perubahan kurikulum ini. "Bukunyahpun belum dicetak, bahan kurikulumnya pun belum dirumuskan. Jadi menurut saya terlalu gegabah jika belum dirumuskan pada waktu dekat," tegas Reni Marlinawati. (as)

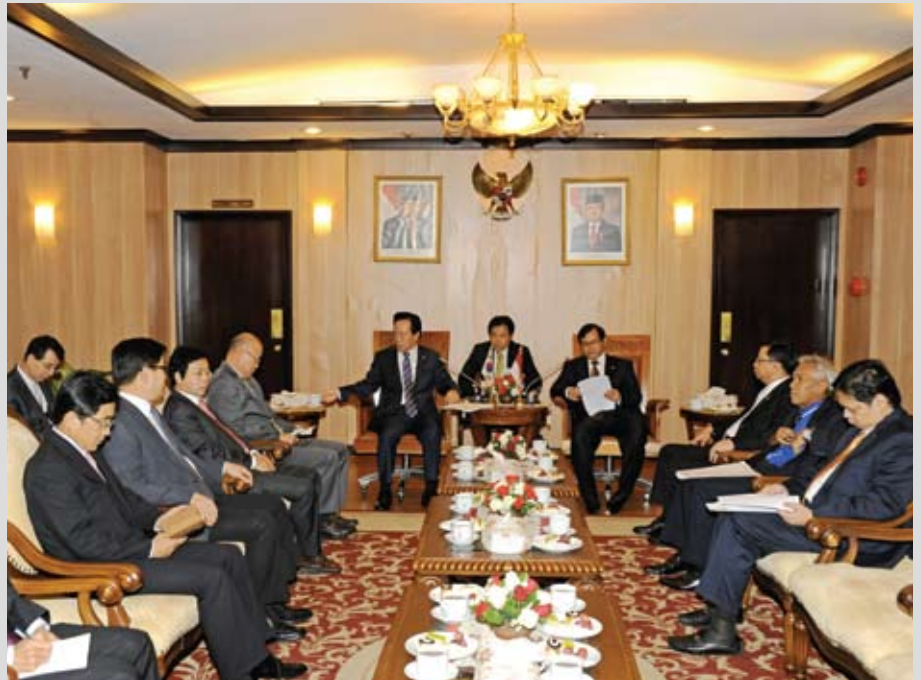
Parlemen Korea Singgung Rencana Restorasi Sungai Ciliwung

Parlemen Korea Selatan meminta dukungan DPR RI untuk meningkatkan kerjasama di sektor lingkungan khususnya restorasi sungai Ciliwung sebagai pilot project awal di Ibukota Propinsi ini.

“Kita ingin membangun kerjasama di sektor lingkungan hidup khususnya restorasi sungai Ciliwung dan kita harapkan dapat berkembang untuk 13 sungai lainnya,” ujar Deputy Speaker national Assembly Lee Byung Suk kepada Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung, yang didampingi Ketua Komisi X DPR Agus Hermanto, Ketua Komisi VI Airlangga Hartarto, dan Wakil Ketua BKSAP Andi Azhar Ghalib, di Gedung DPR RI, Kamis, (10/1).



Wakil Ketua DPR, Pramono Agung, dialog dengan Lee Byung Suk, deputi speaker National Assembly Korea Selatan.



Wakil Ketua DPR, Pramono Agung, didampingi Ketua Komisi X, Ketua Komisi VI dan Wakil Ketua BKSAP menerima kunjungan delegasi Parlemen Korea Selatan.

Lee mengatakan, Korea Selatan juga tertarik untuk bekerjasama dalam sektor otomotif seperti pengembangan *green car* yang ramah lingkungan. selain itu, Lee juga mengharapkan kerjasama sektor perdagangan dan militer seperti pengembangan pesawat latihan korea serta kapal selam dapat berjalan. “Kita mengharapkan pesawat latihan Korea bisa segera diekspor ke Indonesia,” jelasnya.

Lee menambahkan, Parlemen Korea juga meminta dukungan dan peran aktif Indonesia dalam mendorong tercapainya perdamaian di kawasan Semenanjung Korea.

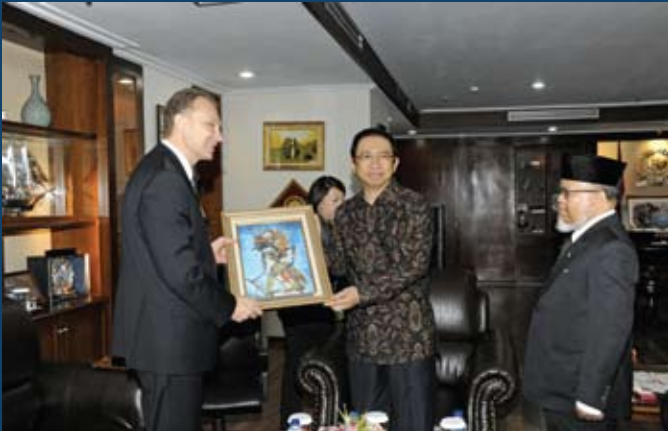
“Kita juga minta kerjasama antar Parlemen semakin meningkat,” harapnya.

Sementara Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, Hubungan bilateral Indonesia dan Korea Selatan sudah berlangsung selama kurun waktu 40 tahun. selain itu, Korea saat

ini telah menjadi kekuatan baru di Asia bahkan dunia. “Dengan Korean Popnya mereka menyebarkan akulturasi kebudayaan dan telah menjadi idola kalangan muda di Indonesia,” paparnya

Pada kesempatan itu, Pramono mendukung penuh kerjasama di bidang lingkungan terkait program restorasi sungai di DKI Jakarta. “Parlemen mendukung kerjasama itu, kita bahkan kerjasama itu tidak berhenti di proyek yang sudah dilakukan saja,” paparnya.

Dia menambahkan, Korea Selatan bisa dijadikan *role model* bagi Indonesia. Sekarang ini, Korea Selatan menguasai industri baja, teknologi dan kondisi yang multi etnik, serta multi partai namun ternyata bisa berkembang menjadi negara yang maju. “Kita prinsipnya ingin mempererat kerjasama keamanan di Kawasan Korea, selain itu saat ini merupakan era bagi bangsa Asia dimana pertumbuhan Cina, Jepang, India dan Indonesia menunjukkan bahwa Pertumbuhan Asia terdapat di era globalisasi ini,” tambahnya. (si)



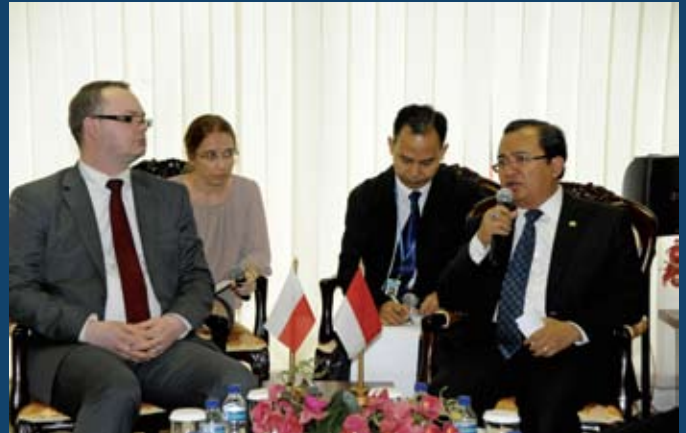
Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Ketua BKSAP Surahman Hidayat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Volodymyr Pakhil dan dilanjutkan dengan saling tukar menukar cinderamata. Kamis (10/01), foto : Iwan Armanias



Ketua DPR RI Marzuki Alie didampingi Ketua BKSAP Surahman Hidayat sesuai menerima Kunjungan Kehormatan Duta Besar Kazakstan Untuk Indonesia A. Orazbay bersama-sama mencermati isi berita Harian Jakarta Post di Gedung Nusantara III DPR RI. Kamis (10/01), foto : Wahyu



Wakil Ketua DPR/Korinbang Pramono Anung menerima Deputy Speaker of The ROK National Assembly Republic of Korea Lee Byung Suk di Gedung Nusantara III DPR RI. Kamis (10/01), foto : Iwan Armanias



Wakil Ketua DPR/Priyo Budi Santoso berdialog dengan Delegasi Kelompok Persahabatan Parlemen Polandia-Indonesia yang dipimpin Krysztof Klosowski di Ruang Rapat BKSAP, Gedung Nusantara III DPR RI. Senin (07/01), foto : Iwan Armanias



Pimpinan Dewan dan Pimpinan Fraksi-Fraksi DPR RI menerima GMKN dan Pimpinan Muhammadiyah terkait masalah Pembubaran BPH Migas. Selasa (08/01), foto : Wahyu





BULETIN
PARLEMENTARIA

NOMOR: 752/XII/2013

I/JANUARI 2013



BULETIN
PARLEMENTARIA

NOMOR: 752/XII/2013

I/JANUARI 2013



BULETIN
Parlementaria

NOMOR: 752/XII/2013

I/JANUARI 2013



BULETIN
PARLEMENTARIA

NOMOR: 752/XII/2013

I/JANUARI 2013